

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, Miriam, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, **Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hartono, Jogianto, **Teori Portofolio dan Analisis Investasi**, Edisi 2. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Hendro, Tri dan Conny Tjandra, **Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia**. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Ibrahim, Johnny, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayu Media Publishing, Malang, 2012.
- Indroharto, **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, **Hukum Investasi & Pasar Modal**. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sartono, Agus R, **Manajemen Keuangan**. BPFE UGM, Yogyakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**. UI-Press, Jakarta, 2007.
- Supancana, Ida Bagus Rachmadi, **Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi**

Langsung di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

Sutedi, Adrian, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.** Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Tandelilin, Eduardus, **Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Edisi Pertama.** BPFE, Yogyakarta, 2000.

Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia,** Edisi II Cet- I. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

JURNAL

Arsil, **Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan,** Jurnal Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2014.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, **Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah,** Jakarta, 2002

OJK, **Booklet Perbankan Indonesia,** Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta, 2014

Sinaga, Rebekka Dosma, **Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,** Jurnal Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera, 2013.

Sundari, Siti, **Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan,** Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.

Syafrudin, Ateng, **Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,** Jurnal Pro Justisia, Volume IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345

MEDIA CETAK/ON LINE/INTERNET

Otoritas Jasa Keuangan, *Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan (online)*, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan> (6 September 2017 pukul 10. 24 WIB).

Otoritas Jasa Keuangan, *Karakteristik Umum Produk Diduga Ilegal (online)*, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/130/karakteristik-umum-produk-diduga-ilegal> (6 September 2017 pukul 10.30 WIB).

P. Paripurna, *Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan Dalam Penanganan Investasi Ilegal (online)*, www.sikapiuangmu.ojk.go.id: edukasi keuangan (6 September 2017 pukul 10. 25 WIB)

Yogie Maharesi, *Investasi Ilegal Problem Lintas Sektoral (online)*, <http://m.kumparan.com/yogie-maharesi/investasi-ilegal-problem-lintas-sektoral.amp> (6 September 2017 pukul 10. 25 WIB)

Wawancara Hamud M. Balfas dengan [medianotaris.com](http://www.medianotaris.com) yang dimuat dalam http://www.medianotaris.com/otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html (1 September 2017 pukul 23.50 WIB).